

Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Tarif Parkir Di Pekanbaru

* Ikhtiaruddin¹, Rendi Tri Afrianda²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : ikhtiaruddin@student.uir.ac.id

Abstrak

Implementasi kebijakan publik berperan penting dalam mendukung tercapainya pelayanan publik yang efektif. Pada bidang transportasi, pelayanan parkir memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Di Kota Pekanbaru, peningkatan jumlah kendaraan menuntut penataan parkir yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 02 Tahun 2025 untuk meninjau kembali tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan tersebut di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori implementasi George C. Edward III yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan evaluasi, terutama dalam aspek sosialisasi, kepatuhan pelaksana, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Kata Kunci: Impelentasi Kebijakan, Pelayanan publik, Retribusi Parkir, Dinas Perhubungan

Abstract

The implementation of public policy plays an important role in ensuring that public services are delivered effectively and in accordance with their intended objectives. In the transportation sector, parking services are closely related to community activities. In Pekanbaru City, the increasing number of vehicles requires better management of on-street parking. The Pekanbaru City Government issued Mayor Regulation No. 02 of 2025 to review the parking retribution fees. This study aims to analyze how the regulation is implemented in the field. The research uses a qualitative method with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis refers to George C. Edward III's policy implementation theory, including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation still requires further evaluation, particularly in terms of socialization, compliance of parking attendants, and the availability of supporting facilities.

Keywords: Policy Implementation, Public Services, Parking Retribution, Department of Transportation

PENDAHULUAN

Parkir merupakan bagian penting dari sistem transportasi yang berfungsi mendukung mobilitas masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru masih menghadapi berbagai permasalahan seperti kurangnya sarana prasarana, pelanggaran ketentuan tarif, serta rendahnya kualitas pelayanan juru parkir. Di Kota Pekanbaru, peningkatan jumlah kendaraan setiap tahun tidak sebanding dengan kapasitas fasilitas parkir. Hal ini memicu berbagai persoalan seperti parkir di lokasi terlarang, pungutan parkir tidak sesuai ketentuan, serta kurangnya transparansi sistem pembayaran. Masyarakat sering mengeluhkan tarif yang tidak terstandarisasi dan pelayanan juru parkir yang dianggap belum maksimal.

Sebagai upaya pembenahan, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 02 Tahun 2025 mengenai peninjauan tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kebijakan ini hadir di tengah kebutuhan masyarakat akan perubahan pelayanan parkir yang lebih baik serta untuk menekan adanya pungutan liar yang selama ini terjadi di lapangan.

Mengacu pada data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2025, tercatat terdapat 3 Zona dalam pembagian titik Lokasi parkir yang ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru. Pembagian Zona tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.
Jumlah jumlah titik/Lokasi dan juru parkir Kota Pekanbaru

No	Titik Lokasi	Jumlah juru parkir
1	Zona 1 (1000 titik lokasi)	873 juru parkir
2	Zona 2 (474 titik lokasi)	150 juru parkir
3	Zona 3 (108 titik lokasi)	102 juru parkir

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Implementasi kebijakan di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan. Masih ditemukan juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa, penerapan tarif yang tidak seragam, serta minimnya pengawasan terhadap pelaksana teknis di lapangan. Selain itu, sarana pendukung seperti papan informasi tarif dan perangkat pembayaran non-tunai belum tersedia secara merata. Permasalahan komunikasi juga menjadi kendala, di mana sosialisasi terkait kebijakan belum menjangkau seluruh juru parkir dan masyarakat pengguna parkir. Akibatnya, muncul ketidaksinkronan antara aturan yang ditetapkan pemerintah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan berpengaruh terhadap rendahnya komitmen pelaksana dalam mematuhi ketentuan tarif dan pelayanan parkir.

Melihat kondisi tersebut, evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini memberikan dampak perbaikan dalam pelayanan parkir di Kota Pekanbaru. Evaluasi ini menjadi penting karena keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari sisi legalitas pembentukan regulasi, tetapi juga dari bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam praktik serta sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan pada empat faktor kunci keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan realitas pelaksanaan.

Dengan demikian, analisis mendalam mengenai implementasi Perwako No. 02 Tahun 2025 diharapkan mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi parkir dan pelayanan publik di Kota Pekanbaru secara berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi pelaksana, terutama dalam memaksimalkan fungsi pengawasan, meningkatkan profesionalitas juru parkir, serta memperkuat sistem administrasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan parkir. Evaluasi berbasis data dan pengalaman empiris di lapangan diharapkan mampu mendorong penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan perbaikan yang terarah, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menghasilkan pelayanan parkir yang transparan, tertib, dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No. 02 Tahun 2025 tentang peninjauan tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Informan penelitian dipilih secara purposive dengan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Informan tersebut terdiri dari pejabat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pihak PT. Yabisa Sukses Mandiri selaku pengelola retribusi parkir, juru parkir yang bertugas di kawasan parkir resmi, serta masyarakat pengguna layanan parkir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung pada titik parkir tepi jalan umum, dan dokumentasi terhadap kebijakan serta data operasional retribusi parkir. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi, tantangan, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan dari perspektif para pelaksana dan penerima layanan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan proses penting yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan yang dilakukan secara terarah dan sesuai prosedur di lapangan. Dalam konteks pengaturan pelayanan parkir di Kota Pekanbaru, implementasi kebijakan mengharuskan adanya koordinasi yang baik, pelaksana yang kompeten, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar kebijakan dapat berjalan efektif. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No. 02 Tahun 2025, penelitian ini menggunakan teori implementasi George C. Edward III yang menekankan empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi antara pemerintah dengan pelaksana teknis kebijakan belum berjalan optimal. Sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat masih terbatas sehingga menimbulkan ketidaktahuan mengenai tarif resmi yang ditetapkan pemerintah. Perbedaan pemahaman antar pelaksana menyebabkan penerapan tarif yang tidak seragam di beberapa titik parkir. Minimnya informasi tertulis seperti papan tarif resmi

juga menjadi faktor yang memunculkan kebingungan dan keluhan pengguna layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian kebijakan belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun sarana prasarana, masih belum memadai. Jumlah juru parkir resmi tidak sebanding dengan banyaknya titik parkir di Kota Pekanbaru sehingga beberapa lokasi masih dikuasai pihak yang tidak berkompeten. Sarana pendukung seperti karcis, rompi identitas juru parkir, serta perangkat pembayaran nontunai belum tersedia secara lengkap. Kurangnya fasilitas tersebut berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan dan tidak maksimalnya penerapan kebijakan di lapangan.

3. Disposisi

Sikap juru parkir sebagai pelaksana kebijakan masih menjadi kendala dalam proses implementasi. Masih ditemukan tindakan yang tidak sesuai prosedur seperti tidak memberikan karcis, memungut tarif melebihi ketentuan, serta pelayanan yang kurang ramah. Hal ini menunjukkan masih lemahnya komitmen dan pemahaman pelaksana terhadap aturan yang berlaku. Meskipun pemerintah telah memberikan arahan dan pelatihan, namun pengawasan terhadap perubahan perilaku juru parkir belum dilakukan secara optimal.

4. Struktur Birokrasi

Secara struktural, Dinas Perhubungan bersama PT. Yabisa Sukses Mandiri telah memiliki pembagian tugas dan SOP dalam pengelolaan parkir. Namun dalam pelaksanaannya, SOP tersebut belum dijalankan secara disiplin dan konsisten oleh seluruh pelaksana. Mekanisme pengawasan yang seharusnya dilaksanakan secara berkala belum berjalan maksimal, sehingga berbagai pelanggaran di lapangan sering tidak terpantau dan tidak ditindak tegas. Koordinasi antara pemerintah, pengelola parkir, dan juru parkir juga perlu diperkuat agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan PT. Yabisa Sukses Mandiri sebagai pihak pengelola retribusi parkir dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan parkir yang lebih teratur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 02 Tahun 2025. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti ketidakpatuhan juru parkir terhadap prosedur, minimnya sarana pendukung, serta kurang optimalnya koordinasi dan pengawasan di lapangan. Dari perspektif masyarakat, keberadaan layanan parkir yang tertib sangat dibutuhkan untuk mendukung kenyamanan mobilitas, namun mereka juga menuntut adanya pelayanan yang lebih profesional serta kepastian tarif sesuai aturan yang berlaku.

SIMPULAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru No. 02 Tahun 2025 mengenai peninjauan tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum belum berjalan optimal, karena masih ditemui perbedaan antara aturan tarif yang ditetapkan dengan praktik pemungutan tarif di lapangan.

2. Pada indikator komunikasi, sosialisasi kepada juru parkir dan masyarakat masih kurang menyeluruh sehingga menyebabkan rendahnya pemahaman terkait tarif resmi dan prosedur pelayanan parkir yang benar.
3. Pada indikator sumber daya, keterbatasan jumlah juru parkir resmi, kurangnya fasilitas seperti karcis dan papan informasi tarif, serta belum maksimalnya dukungan teknologi menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.
4. Pada indikator disposisi, masih ditemukan juru parkir yang tidak mematuhi SOP seperti tidak memberikan karcis, memungut tarif melebihi ketentuan, dan kurang profesional dalam melayani pengguna parkir sehingga menunjukkan komitmen pelaksana masih lemah.
5. Pada indikator struktur birokrasi, pembagian tugas dan SOP telah ditetapkan, namun pelaksanaannya belum konsisten dan pengawasan Dinas Perhubungan bersama PT. Yabisa Sukses Mandiri masih perlu diperketat agar kebijakan dapat diterapkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis* (6th ed.). Routledge.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu* (Edisi 4). Gava Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2020). *Kebijakan Publik di Indonesia: Analisis, Formulasi, dan Implementasi*. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2022). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).